



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SALATIGA
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SRI SATUTI**
2. Jabatan : **ASISTEN ADMINISTRASI UMUM**
3. NHK : **413467**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN****Rp. 688.205.000**

1. Tanah Seluas 2080 m2 di BOYOLALI, WARISAN Rp. 56.160.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/120 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 150.200.000
3. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 78.800.000
4. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 78.800.000
5. Tanah Seluas 1021 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 27.567.000
6. Tanah Seluas 1009 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 27.243.000
7. Tanah Seluas 529 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 14.283.000
8. Tanah Seluas 691 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
9. Tanah Seluas 551 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 45.182.000
10. Tanah Seluas 200 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 48.600.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/154 m2 di BOYOLALI, HASIL SENDIRI Rp. 126.370.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**Rp. 445.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp.



200.000.000

2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

220.000.000

3. MOTOR, HONDA SUPRA Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp.

8.000.000

4. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp.

17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 100.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 522.286.942

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.755.491.942

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.755.491.942

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.